

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan

Oleh

Restu Dwi Sekar Lestari

E051 181 006



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh
RESTU DWI SEKAR LESTARI
E051 181 006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

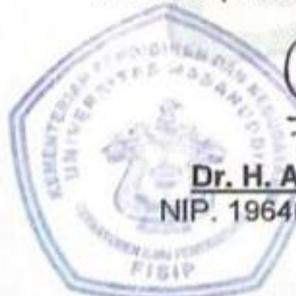
Pembimbing Pendamping

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.
NIP.19680411 200012 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan di susun oleh

RESTU DWI SEKAR LESTARI

E051 181 006

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 31 Januari 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si

()
()
()
()

()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restu Dwi Sekar Lestari

NIM : E051181006

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Januari 2022

Menyatakan

Restu Dwi Sekar Lestari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Tidak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad shallallahu alaihi wassallam, penuntun umat manusia menuju jalanNya yang terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Di Kota Makassar". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang penulis lalui sejak awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat kemauan yang kuat, usaha keras yang disertai dengan doa tentunya. Pun juga dukungan, tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Mustari Saleh dan Rati Puspasari. juga kepada wahyudi selaku orangtua sambung dari penulis dan kepada saudara penulis Mira Tasya Gismayani. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih selalu memberikan nasihat agar menjadi pribadi yang lebih baik dimana selalu mengingatkan agar selalu mengingat kepada Allah SWT serta selalu mendoakan disetiap langkah dengan tiada hentinya sehingga penulis bisa sampai hingga saat ini. Doa terbaik untuk kalian semua. Aamiin

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staff; dan Berkenan menjadi pembimbing Utama sekaligus penasehat akademik saat penulis menyusun skripsi,

mengarahkan dengan sepenuh hati, dan memberi solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan penulisan skripsi ini. Semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai bapak.

4. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga selesai. seluruh bekal ilmu yang pernah bapak bagikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan di masa mendatang. Merampungkan skripsi bukanlah momen mudah yang harus penulis jalani sebagai mahasiswa, semoga kebaikan selalu menyertai bapak.
5. Kepada para Tim Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si., Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si., Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si., Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si., Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si., Bapak Dr. H. A. M Rusli, M.Si., Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si., dan Bapak Ashar Prawitno,

S.IP, M.Si., terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Hasanuddin;

7. Pak Mursalim, S.IP selaku Staf Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah membantu dalam segala urusan administratif dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Bapak Rusmayani Majid selaku Plt Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Andi Salman Baso selaku Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, Bapak Burhanuddin selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Ibu Dewi Rosita selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Tamalate, Bapak Nur Adnan selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Maccini Sombala, Bapak Syahrial S. selaku Camat di Kecamatan Ujung Pandang, Bapak Muhammad Said selaku Lurah di Kelurahan Lae Lae, ibu Basma, Ibu Risna, Bapak Abd. Rahim selaku masyarakat yang ada di Kecamatan tempat penulis meneliti.
9. Teman-teman “Eleftheria” Ilmu Pemerintahan 2018 saudara-saudari teman seperjuangan penulis terimakasih atas kesenangan, canda tawa dan menjadi keluarga baru untuk penulis;

10. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama penulis berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah bagi penulis di beberapa tahun ini.
11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kema Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama penulis berproses di Kema Fisip Unhas. Bersama, Bersatu, Berjaya;
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Nisha Dwi Utami, Ayuni Cahya Ningsih, Eka Rumalang, Minarni, Sri Devy Ramadhani, Yang selama ini telah berbagi kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, terima kasih sudah menemani perjalanan penulis hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian;
13. Kepada teman-teman penulis sekaligus adik untuk penulis aldiani Fitriayu Sam, Zhahrilla Adriani Syam, Umi Kalsum, Nurul Alfiani, Lili Ling, Sitti Nurul Aflaha, venike Sriyanti, Muthmainnah Putri Husaeini, Tisa Ramadhani. Terima kasih atas bantuan, saran, diskusi serta kerjasamanya pada saat penulis mengalami masa-masa sulit selama menyusun skripsi ini;
14. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel. 106, khususnya Kecamatan Mamajang atas kebersamaannya. Semoga kita masih punya waktu luang untuk dapat bertemu kembali. Doa terbaik untuk kalian semuanya;

15. Kepada Andi Mushawwir Terimakasih sudah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi melalui hal-hal yang tidak terduga, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
16. Kepada Restu Dwi Sekar Lestari (Diri saya sendiri), terima kasih sudah berhasil mengalahkan rasa malas, untuk masih tetap semangat menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak mudah dan terima kasih juga karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Percayalah kamu hebat!.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, Teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesai.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 31 Januari 2022

Restu Dwi Sekar Lestari

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENERIMAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Peran.....	12
2.1.2 Pemerintah Daerah dan Fungsinya dalam Pemberdayaan masyarakat.....	15
2.1.3 Masyarakat Prasejahtera.....	23
2.1.4 Kerangka Konsep.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian	30

3.4 Sumber Data Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar	37
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar	49
4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Tamalate	58
4.2 Hasil penelitian Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Kota Makassar	67
4.2.1 Penysadaran dan Pembentukan Perilaku Masyarakat.....	68
4.2.2 Transformasi Kemampuan Masyarakat.....	71
4.2.3 Peningkatan Kemampuan Intelektual.....	75
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN - LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020	5
Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Prasejahtera Di Kota Makassar Setiap Kecamatan Tahun 2020	6
Tabel 4.1 Luas Kota Makassar Berdasarkan Luas Kecamatan	40
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2020	41
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Produktif Kota Makassar	42
Tabel 4.4 Penduduk Kota Makassar Dirinci Menurut Produktivitas	43
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Tamalate	61
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio Di Kecamatan Tamalate	62
Tabel 4.7 Data Jumlah Masyarakat Penghasilan Rendah Kecamatan Tamalate	62
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Ujung Pandang	66
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio Di Kecamatan Tamalate	66
Tabel 4.10 Jumlah Rincian Perhitungan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Makassar	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tamalate	63
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Ujung Pandang	67
Gambar 4.5 Bantuan Sembako Yang Di Berikan Kepada Masyarakat Prasejahtera	73
Gambar 4.6 Usaha Bapak Abd. Rahim Ali Selaku Masyarakat Penerima Bantuan UEP Yang Telah Mandiri	77

INTISARI

Restu Dwi Sekar Lestari, Nomor Induk Mahasiswa E051181006, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera di Kota Makassar, di bawah bimbingan Dr. A.M. Rusli, M.Si sebagai pembimbing utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera di Kota Makassar menggunakan tahap pemberdayaan yang dikemukakan oleh sulistiyani, untuk mencapai tujuan tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera yang berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016. pemberdayaan masyarakat prasejahtera dapat dilakukan melalui tiga tahap. Yang pertama tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, kedua tahap transformasi kemampuan dan yang terakhir yaitu tahap peningkatan kemampuan. Pemberdayaan masyarakat prasejahtera di Kota Makassar melalui tiga tahapan dianggap belum sepenuhnya optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan ketersediaan anggaran yang terbatas khususnya di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Masyarakat Prasejahtera, Kota Makassar*

ABSTRACT

Restu Dwi Sekar Lestari, Student Identification Number E051181006, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled *Analysis of the Role of Local Government in Empowering Of Poor Communities in Makassar City*, under the guidance of Dr. A.M. Rusli, M.Si as main guide and Mr. Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si as associate advisor. This study aims to determine the analysis of the role.

This study aims to find out the role of regional governments in the empowerment of poor community in the city of makassar USES the level of empowerment presented by sulistiyani, to achieve the goal.

This type of research uses qualitative study method and using descriptive data. Data-collection techniques are used by observation, interview, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

Research shows that the region of makassar city in this case social services have made a number of efforts in the empowerment of praient societies based on the fundamental task and function embodied in 2016 mayor makassar's rule number 89. Poor community empowerment can take place through three stages. The first is the development and development of behavior, the second the transformation of the ability and the last is the upgrade of the ability. Prawn urban empowerment through three stages is considered not yet fully optimized by the government.

Keywords: *Empowerment, The Poor Community, Makassar City*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan Sosial.

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar (Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu Kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi Kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 adalah 1,42 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi karena jumlah penduduk yang banyak

dianggap sebagai beban pembangunan dan memperkecil pendapatan perkapita serta menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Selain banyaknya jumlah penduduk pada tahun 2020 juga muncul virus Covid-19 yang berdampak pada segala bidang terutama kesehatan dan ekonomi. Munculnya virus ini menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Masalah kesejahteraan atau kemiskinan merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk diselesaikan. Berdasarkan data dari badan pusat statistik tahun 2020 Kondisi kemiskinan masyarakat Indonesia masih mencapai 10,19 persen pada September 2020. Jumlah penduduk miskin di perkotaan 12,04 juta orang, dan di perdesaan 15,51 juta orang pada September 2020.

Tingginya tingkat kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang memprihatinkan, mengingat bahwa kemiskinan bukanlah sebuah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Kepemilikan sumber daya yang tidak setara, kapasitas masyarakat yang minim, dan ketimpangan akses dalam produksi menyebabkan partisipasi dalam pembangunan yang lamban. Semua ini, pada gilirannya, menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan, pada gilirannya, menciptakan struktur komunitas yang tidak seimbang. Ketimpangan ekonomi ini dapat merusak kesejahteraan pribadi dan

sosial dan berpotensi merusak keamanan masyarakat. (Ginting & Yusraini, 2020, p.4).

Secara umum ada dua faktor utama penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan yang saling terkait: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah dan hambatan yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti motivasi berprestasi yang rendah, kurangnya modal, penguasaan manajemen yang lemah, dan aspek teknologi. Selanjutnya faktor eksternal terkait dengan kondisi kelembagaan yang belum kondusif. Selain itu, minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya menyebabkan potensi masyarakat kurang berkembang. Berdasarkan logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat, maka strategi pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan harus menyentuh permasalahan masyarakat, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Masalah kemiskinan yang terjadi pada kota Makassar merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hal ini berhubungan dengan mensejahterakan rakyat dimana sangat jelas diamanatkan dalam undang-undang tahun 1945. Hal serupa juga terdapat dalam undang- undang no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin telah dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan potensi

diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, dan pelayanan sosial bagi fakir miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2019. Secara absolut jumlah kenaikan penduduk miskin pada tahun 2020 adalah sebesar 4,86 ribu jiwa, yaitu dari 65.12 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 69,98 ribu jiwa pada tahun 2020. Hal ini merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan hingga ke level terendah dan tentunya akan menjadi tantangan yang semakin sulit. Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar sudah jumlahnya paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi selatan. Berikut dapat dilihat pada tabel

Tabel 1.1
 Jumlah Penduduk Miskin menurut kabupaten/ kota
 Di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang)	
	2019	2020
SULAWESI SELATAN	767.8	776.83
Kepulauan Selayar	17.36	17.04
Bulukumba	30.49	30
Bantaeng	16.91	16.84
Jeneponto	54.05	53.24
Takalar	25.93	25.38
Gowa	57.99	57.68
Sinjai	22.27	22.06
Maros	34.85	34.62
Pangkajene Dan Kepulauan	47.07	47.12
Barru	14.92	14.44
Bone	76.25	81.33
Soppeng	16.45	17.23
Wajo	27.48	27.69
Sidenreng Rappang	14.44	15.36
Pinrang	31.85	33.56
Enrekang	25.4	25.25
Luwu	46.18	46.04
Tana Toraja	28.87	28.41
Luwu Utara	42.48	42.2
Luwu Timur	20.83	20.82
Toraja Utara	28.64	27.88
Kota Makassar	65.12	69.98
Kota Parepare	7.62	7.96
Kota Palopo	14.37	14.71

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Berdasarkan rekapitulasi data terpadu kesejahteraan sosial periode 31 agustus 2020 jumlah masyarakat prasejahtera di Kota Makassar setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2

Jumlah Masyarakat Prasejahtera di Kota Makassar Setiap Kecamatan
Tahun 2020

REKAPITULASI TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL 2020				
NO	KECAMATAN	INDIVIDU	KELUARGA	RUMAH TANGGA
1	MARISO	28.231	7.047	4.017
2	MAMAJANG	20.343	4.829	4.130
3	MAKASSAR	43.696	9.956	10.207
4	UJUNG PANDANG	6.147	1.645	766
5	WAJO	7.871	2.109	1.054
6	BONTOALA	22.936	5.548	3.693
7	TALLO	67.771	15.802	12.257
8	UJUNG TANAH	21.461	5.373	3.510
9	PANAKUKANG	51.848	12.756	12.536
10	TAMALATE	74.025	18.915	14.832
11	BIRINGKANAYA	51.398	14.022	9.167
12	MANGGALA	40.237	10.996	6.678
13	RAPPOCINI	41.158	10.152	9.400
14	TAMALANREA	20.108	5.842	3.451
15	KEPULAUAN SANGKARRANG	10.764	3.117	414
16	NULL	1.038	128	1035
TOTAL		509.032	128.237	97.147

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar

Memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa kemiskinan di Kota Makassar tidak dapat disepelekan begitu saja. Kondisi kemiskinan ini menjadi hal yang patut pemerintah kota Makassar segera atasi dan memaksimalkan peran yang dimilikinya terutama dalam pembuatan perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini meresahkan masyarakat dan strategi pemberdayaan kelompok miskin agar dapat memiliki kehidupan yang lebih layak.

Strategi pemberdayaan masyarakat miskin merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2015 pada BAB IV Pasal 5. pada peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan aksi penanggulangan kemiskinan kota makassar dilaksanakan oleh SKPD terkait dalam hal ini adalah dinas sosial kota makassar. Kemudian, diperjelas oleh Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial . Pada BAB III Paragraf 1 Pasal 18 bagian (3). Disimpulkan bahwa pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam hal menangani masalah kemiskinan yang ada di kota makassar.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005:57). Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tetapi masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, sehingga banyak program-program pemberdayaan yang berhenti begitu saja tanpa ada perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, akibatnya program

berakhir tanpa menimbulkan dampak berarti dan tidak berpengaruh secara signifikan bagi kehidupan masyarakat yang tergolong miskin.

Secara faktual kota Makassar memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui program-program pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh data tingkat kemiskinan Kota Makassar yang meningkat, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera di Kota Makassar dapat diidentifikasi berbagai fenomena yakni Pemerintah Kota Makassar telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat prasejahtera, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup dan berada di bawah garis kemiskinan sehingga masyarakat tersebut tetap tidak berdaya.

Berdasarkan deskripsi diatas merupakan pusan masalah yang terjadi pada masyarakat prasejahtera di Kota Makassar. Hal demikian seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah daerah dalam mencari solusi pemecahan masalah bagi kelompok yang tergolong sebagai masyarakat prasejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial menjelaskan bahwa dinas sosial khususnya pada seksi pemberdayaan fakir miskin memiliki beberapa uraian tugas dalam mengurangi masyarakat prasejahtera yang ada di Kota Makassar, yaitu:

- melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
- menyelenggarakan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Usaha Bersama, Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan bagi fakir miskin;

Kemudian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “ ***Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera Di Kota Makassar***”

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat prasejahtera?

2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam transformasi kemampuan masyarakat prasejahtera?
3. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam peningkatan kemampuan intelektual masyarakat prasejahtera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat prasejahtera
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam transformasi kemampuan masyarakat prasejahtera
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam peningkatan kemampuan intelektual masyarakat prasejahtera

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Secara praktis penelitian ini juga merupakan sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan dan pengembangan di bidang usaha kesejahteraan social
- c. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan pustaka dapat didefinisikan adalah bab yang membahas tentang tinjauan mengenai teori-teori terhadap judul tulisan atau skripsi yang ingin peneliti lakukan

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran

Setiap makhluk hidup dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan terkhusus pada makhluk sosial yaitu manusia. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan manusianya itu sendiri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan peran sebagai berikut:

- a. adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.

b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan serangkaian tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan:

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari berbagai pendapat yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan

seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) yang apabila ia melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika hubungkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat prasejahtera di Kota Makassar.

2.1.2 Pemerintah Daerah dan Fungsinya dalam Pemberdayaan masyarakat

Terbentuknya suatu negara pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah pemerintah. Pembentukan pemerintah ini memunculkan keberadaan dua kelompok, yakni orang yang memerintah di satu pihak yang memerintah di lain pihak.

Pengertian pemerintah dapat dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009:197).

1. Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Tujuan pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di entrasi dan tugas pembantuan.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki hubungan yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan

yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas-asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, dekonstruksi, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. (Siswanto Sunarno 2014:34). Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun adapula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya.

Dalam pemerintahan modern Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai berikut:

“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public

service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.” (Muhadam Labolo 2014:34).

Sesuai dengan salah satu fungsi yang dikemukakan oleh Ryaas Rsyid Yaitu fungsi pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan pembangunan. Adi (2008) mengatakan bahwa “pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program maupun sebagai suatu proses”. Pemberdayaan disebut program bila dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan membutuhkan jangka waktu tertentu untuk pencapaiannya. Pemberdayaan dipandang sebagai proses apabila pemberdayaan itu terus berjalan sepanjang usia manusia dan tidak berhenti di suatu masa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok

lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010)

Pemberdayaan bukan hanya sebuah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas.

Pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 75-130) merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, yang meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pada BAB III Paragraf 1 Pasal 18 Ayat (3) menjelaskan bahwa Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
- d. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pemberian pelayanan bagi fakir miskin;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan fakir miskin dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;

- g. menyelenggarakan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif, Kelompok Usaha Bersama, Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan bagi fakir miskin;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka secara

otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya.

2.1.3 Masyarakat Prasejahtera

Masyarakat memiliki definisi sebagai sejumlah manusia yang merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Menurut Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Masyarakat perkotaan yang termasuk fakir miskin atau masyarakat miskin kota adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat.

Menurut Sunartiningsih (2004: 80), Kemiskinan merupakan salah satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menurut Badan Pusat Statistik kriteria masyarakat prasejahtera dibagi menjadi 14 kategori yaitu :

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari;

11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik;

12) Sumber penghasilan rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnyadengan pendapatandi bawah Rp 600.000,- per bulan;

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD;

14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan kriteria diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat prasejahtera adalah masyarakat yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya pendapatan yang dihasilkan per bulan yang tidak sesuai dengan tingginya harga kebutuhan hidup dasar. Di mana masyarakat ini masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam berbagai segi kehidupan, termasuk bantuan pemberdayaan agar masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidup dan menimbulkan kemandirian di dirinya.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 (dalam LincolinArsyad,1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian:

1. Kemiskinan Absolut adalah Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.
2. Kemiskinan Relatif adalah Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural adalah Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingakat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak maumemperbaiki kondisinya.
4. Kemsikinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang

diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

2.1.4 Kerangka Konsep

Salah satu kebijakan pemerintah yang digunakan sebagai objek pembangunan adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah selain fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Dalam fungsi pemberdayaan, pemerintah melakukan berbagai inovasi dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai penggerak disertai sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pemberdayaan masyarakat prasejahtera dianggap penting karena dengan adanya pemberdayaan, diharapkan dapat menciptakan kemandirian yang berkelanjutan sehingga, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonom memiliki peran menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dasar hukum pemberdayaan masyarakat miskin terdiri dari UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah Kota Makassar Tahun 20015-2019, Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera dapat dilihat melalui skema berikut.

Skema Kerangka Pikir Penelitian

